

**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG**

Muhammad Iqbal

Email : ballig85@gmail.com

Ahmad Riyadi

Email : ahmad312riyadi@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran serta pengaruh akuntabilitas keuangan desa dan transparansi anggaran terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Di susun oleh Ahmad Riyadi, diawah bimbingan Muhammad Iqbal, S.E., M.M. dan Drs. H. Dani Rachman, M.Si. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terhadap 60 responden yang merupakan Aparatur desa dan masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Bojongsoang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik akuntabilitas keuangan desa maupun transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : Akuntabilitas Keuangan Desa, Transparansi Anggaran, Tingkat Kepercayaan Masyarakat

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan secara akuntabel dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pemerintahan desa. Transparansi berarti pemerintahan desa mengelola keuangan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memahami bagaimana dana digunakan. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam pertanggungjawaban yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media. Hal ini berarti pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas pengelolaan dan penggunaan dana. Keduanya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang tepat dan efektif.

Kepercayaan masyarakat desa sangat dipengaruhi tata kelola keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Tata kelola yang bertanggung jawab atas

**Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa dan
Transparansi Anggaran Terhadap Tingkat
Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan
Bojongsoang Kabupaten Bandung| Muhammad
Iqbal dan Ahmad Riyadi**

alokasi dana desa merupakan penunjang, bagi pembangunan desa. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan menyediakan informasi keuangan yang transparan, melalui laporan keuangan dan evaluasi kinerja pemerintah desa.

Di era reformasi yang semakin berkembang, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di tingkat desa semakin meningkat. Desa sebagai unit pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat harus mampu menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini penting, karena tingkat kepercayaan yang tinggi dapat berimplikasi positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Kurniawan (2021:45) menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan desa mencerminkan sejauh mana pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pihak terkait, sedangkan transparansi anggaran berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan desa. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara jujur dan adil. Transparansi anggaran adalah keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan. Menurut Bastian transparansi yang tinggi dalam pengelolaan anggaran dapat menekan penyalahgunaan dana, mengurangi risiko korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, transparansi juga mendorong akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan keuangan yang diambil. Dengan keterbukaan ini, pemerintah lebih mudah memperoleh legitimasi dan dukungan publik karena masyarakat merasa dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah, menjadikan transparansi anggaran sebagai faktor utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 telah menjelaskan pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan akuntabilitas keuangan desa. Informasi keuangan desa wajib diinformasikan pemerintah desa kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat diberi hak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintahan desa. Mereka juga berhak untuk mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengelolaan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakatan desa, serta pembinaan kemasyarakatan. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Hak diberikan kepada masyarakat desa untuk meminta dan memperoleh informasi tentang penganggaran desa, siapa yang melakukan kegiatan dan tim yang melakukannya, berapa banyak kegiatan yang telah diselesaikan, dan berapa banyak anggaran yang masih tersedia.

Di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, masih terdapat fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Beberapa laporan, seperti yang disampaikan oleh Setiawan, (2022:75) mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran desa, di mana distribusi dana tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, minimnya transparansi dalam penyampaian laporan keuangan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat semakin memperburuk kondisi ini. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa berpotensi menimbulkan spekulasi negatif, memperbesar ketidakpercayaan, dan melemahkan partisipasi warga dalam proses pembangunan desa. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya akuntabilitas pemerintah desa yang dipertanyakan, tetapi juga stabilitas sosial dan efektivitas penggunaan dana desa yang dapat terdampak secara signifikan.

Tabel 1
APBD Tahun 2024 Desa di Kecamatan Bojongsoang

1. Desa Bojongsoang		
Pendapatan Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendapatan	3.121.212.100	3.121.212.100
Belanja Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah	1.454.225.500	1.454.225.500
Bid. Pembangunan	1.070.611.400	1.070.611.400
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	183.074.000	183.074.000
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	267.901.200	267.901.200
Bid. Penanggulangan Bencana	145.400.000	145.400.000
Jumlah	3.121.212.100	3.121.212.100
Plus/Defesit	0	0
2. Desa Bojongsari		
Pendapatan Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendapatan	3.153.066.900	3.153.066.900
Belanja Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah	1.506.473.950	1.506.473.950
Bid. Pembangunan	830.897.150	830.897.150
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	371.296.800	371.296.800
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000	30.000.000
Bid. Penanggulangan Bencana	414.399.000	414.399.000
Jumlah	3.153.066.900	3.153.066.900
Plus/Defesit	0	0
3. Desa Tegalluar		
Pendapatan Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendapatan	3.449.050.000	3.449.050.000
Belanja Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah	1.484.394.400	1.484.394.400
Bid. Pembangunan	1.043.493.000	1.043.493.000
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	182.719.400	182.719.400
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	288.000.000	288.000.000
Bid. Penanggulangan Bencana	236.000.000	236.000.000
Jumlah	3.234.606.800	3.449.050.000
Plus/Defesit	0	0
4. Desa Buah Batu		
Pendapatan Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendapatan	2.813.418.826	2.813.418.826
Belanja Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah	1.304.145.000	
Bid. Pembangunan	885.229.400	885.229.400
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	141.193.600	141.193.600
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	250.052.000	250.052.000
Bid. Penanggulangan Bencana	202.188.800	202.188.800
Jumlah	2.812.738.800	2.812.738.800
Plus/Defesit	680.026	0
5. Desa Lengkong		
Pendapatan Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendapatan	2.860.083.900	2.860.083.900
Belanja Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah	1.332.692.000	1.332.692.000
Bid. Pembangunan	896.210.500	896.210.500
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	276.958.400	276.958.400
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	219.223.000	219.223.000
Bid. Penanggulangan Bencana	135.000.000	135.000.000
Jumlah	2.860.083.900	2.860.083.900
Plus/Defesit	0	0

Sumber : Kantor Desa di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

**Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa dan
Transparansi Anggaran Terhadap Tingkat
Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan
Bojongsoang Kabupaten Bandung| Muhammad
Iqbal dan Ahmad Riyadi**

Berdasarkan tabel di atas mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2024 Sudah sesuai dari anggaran yang diberikan dengan realisasi yang diterima, namun bagi desa Buah Batu memiliki defesit sebesar 680.026, Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tuntutan terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik semakin menguat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di Desa benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. namun dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, kurangnya transparansi informasi anggaran, hingga minimnya sosialisasi terhadap realisasi kegiatan pembangunan yang dibiayai APBDes. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Terlihat di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Bojongsoang, Bojongsari, dan Tegalluar. Menurut Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2025 dengan Bapak Acep Syahur Mulyaman. Bapak Asep Sunandar menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah memasang informasi perencanaan dan realisasi APBDes melalui papan informasi atau *billboard* berukuran besar (sekitar 2x3 meter) di ruang publik sebagai bentuk transparansi, sebagian masyarakat masih merasa kurang memahami isi anggaran secara rinci. Selain itu, proses perencanaan anggaran desa dilakukan melalui Musyawarah Dusun hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai ketimpangan informasi dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Di Desa Bojongsari, misalnya, kepala desa menyatakan bahwa meskipun tokoh masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, masyarakat tetap menginginkan informasi yang lebih detail terkait penggunaan dana, seperti proporsi anggaran untuk fisik, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan. Begitu juga di Desa Tegalluar dan Bojongsoang, kendala komunikasi dan pemahaman masyarakat terhadap alur dan mekanisme APBDes masih menjadi tantangan tersendiri, meskipun telah dilakukan sosialisasi di tingkat RW dan Dusun.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi anggaran desa dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun upaya untuk membuka informasi telah dilakukan, belum tentu berdampak signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menurut Yuliani R. (2020:45) Masalah yang sering muncul adalah masih banyak pemerintah desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Kurangnya pengetahuan aparat desa mengenai pengelolaan keuangan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di level desa. Dalam hal ini pada, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara akuntabilitas keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Misalnya, dalam studi oleh Prasetyo, ditemukan bahwa desa yang melakukan laporan keuangan secara akuntabel cenderung mendapat respon positif dari masyarakat.

Menurut Sari, menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan Masyarakat. Sementara itu, Ramdani, dalam penelitiannya di Kabupaten Sumedang menemukan bahwa transparansi anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap partisipasi dan kepercayaan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa oleh Aparat desa. Sedangkan oleh Yuliani dan Prasetyo juga menyimpulkan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat kepercayaan Masyarakat, baik secara parsial maupun simultan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa secara parsial terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongsoang.
2. Bagaimana pengaruh Transparansi Anggaran secara parsial terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongsoang.
3. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa dan Transparansi Anggaran secara simultan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongsoang.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas Keuangan Desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akuntabilitas keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sari dan Lestari, (2020:89) akuntabilitas keuangan desa meliputi kemampuan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab atas penggunaan dana desa. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik serta mencegah praktik penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas dalam keuangan desa, diharapkan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2.1.2 Pengertian Transparansi Anggaran

Menurut Mardiasmo, (2017:61) Transparansi Anggaran merupakan elemen penting dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada publik, yang memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengambilan keputusan serta penggunaan sumber daya publik. Transparansi bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Sedarmayanti Transparansi juga dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan terhadap aktivitas pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dengan keterbukaan, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan dapat mengevaluasi apakah pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut Mahmudi (1015:122) Selain itu, transparansi mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun hubungan kepercayaan dengan masyarakat. Pemerintah yang transparan akan lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat, karena dianggap tidak menyembunyikan informasi penting dan menjalankan amanah publik secara terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mencerminkan keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan serta penggunaan sumber daya publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mendorong terciptanya pemerintahan yang adil, efisien, efektif, dan akuntabel. Selain itu, transparansi juga menjadi salah satu upaya pemerintah

dalam membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi secara terbuka dan bertanggung jawab.

2.1.3 Pengertian Tingkat Kepercayaan Masyarakat

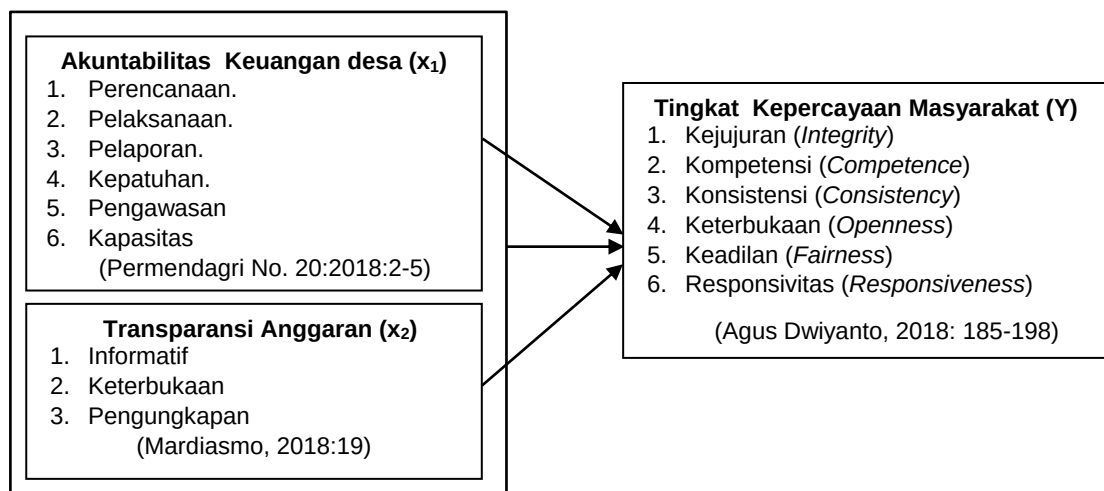
Menurut Widodo, J. (2018:78) Tingkat kepercayaan masyarakat merupakan sikap positif masyarakat terhadap pemerintah desa yang tercermin dalam keyakinan bahwa pemerintah desa mampu mengelola keuangan dan menjalankan program pembangunan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab

Menurut Hardin, (2022:46) kepercayaan adalah harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain bahwa pihak tersebut akan bertindak secara menguntungkan, atau setidaknya tidak merugikan, dalam suatu hubungan sosial. Sedangkan menurut Kurniasih, (2021:123) dalam konteks pemerintahan desa, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibentuk oleh hasil program pembangunan, tetapi juga oleh proses partisipatif, transparansi anggaran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Menurut Fitriyana, Kepercayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai persepsi masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik dari pemerintah desa dalam memenuhi kepentingan publik. Artinya, ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah desa menjalankan tugas dengan jujur dan terbuka, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Kepercayaan publik sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan efektivitas kebijakan pemerintah. Sedangkan Menurut Fukuyama, masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih mudah menerima program-program pemerintah dan terlibat aktif dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat adalah hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh kinerja pemerintah desa, khususnya dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintahan desa, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk menaruh kepercayaan pada pemerintah desa. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan.

2.2 Kerangka pemikiran

Adapun Kerangka Pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat, disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Gambar 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya serta mengacu pada kerangka pemikiran yang telah disusun, maka peneliti merumuskan hipotesis peneliti sebagai berikut :

1. Terdapat Pengaruh Akuntabilitas keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Bojongsoang.
2. Terdapat Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Bojongsoang.
3. Terdapat Pengaruh Akuntabilitas keuangan desa dan Transparansi anggaran terhadap Tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bojongsoang.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat kepercayaan Masyarakat (Y)
2. Akuntabilitas Keuangan Desa (X_1)
3. Transparansi Anggaran (X_2)

3.2 Metode Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni model penelitian deskriptif, dimana model penelitian ini menjelaskan kondisi yang ada pada masa sekarang atau dapat disebut mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa kejadian yang terjadi pada masa sekarang.

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2019:61) populasi adalah area umum yang terdiri dari objek/subjek dengan ukuran dan karakteristik spesifik yang ditentukan oleh peneliti dan kemudian diselesaikan.

Dari definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu populasi memiliki karakteristik spesifik dan merupakan sekelompok orang, peristiwa, atau objek yang diproses oleh objek penelitian. Populasi digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Bojongsoang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur/kasi (Keuangan, Perencanaan, Pemerintahan dan Kaur Umum) dan warga dari setiap desa diwakili oleh Kadus adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang, yang terdiri dari apratur desa dan perwakilanya dari ke enam desa yang ada di kecamatan bojongsoang.

3.2.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik sampel. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat memeriksa segala sesuatu yang ada dalam populasi, misalnya, karena keterbatasan atau energi, peneliti dapat menggunakan sampel populasi. Apa yang kami pelajari dari sampel populasi.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu, metode pemindaian probabilitas yang tidak benar. Artinya, setiap anggota populasi tidak memiliki peluang atau peluang yang sama dengan sampel. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan pendekatan sampel yang ditargetkan. Namanya menunjukkan bahwa sampel diadopsi untuk tujuan atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu dianggap sebagai sampel karena para peneliti percaya bahwa seseorang atau sesuatu memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian mereka. Kriteria sampel yang digunakan sebanyak 60 orang dalam penelitian ini adalah peralatan pemerintah di desa-desa yang melakukan fungsi akuntansi/manajer keuangan dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan atau mengelola dana desa.

Tabel 2
Sampel Penelitian (Responden)

No	Nama Desa	Kepala Desa	Sekertaris Desa	Kaur/kasi	Warga/kadus	Jumlah
1	Desa Bojongsari	1	1	4	4	10
2	Desa Bojongsoang	1	1	4	4	10
3	Desa Buah batu	1	1	4	4	10
4	Desa Cipagalo	1	1	4	4	10
5	Desa Lengkong	1	1	4	4	10
6	Desa Tegalluar	1	1	4	4	10
	Total Sampel	6	6	24	24	60

3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Analisis Regresi linear Berganda

Analisis linear regresi berganda digunakan peneliti, Jika para peneliti ingin mengetahui tingkat dan kedalaman variabel yang diperiksa, para peneliti menggunakan analisis linier dari beberapa regresi. Ini mengikuti pendapat Sugiyono bahwa jika peneliti memprediksi, peneliti menggunakan analisis regresi berganda prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

2. Analisis koefisien korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria Koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 3
Koefisien Korelasi dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231)

3. Koefisien Determinasi

Setelah Koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Ghozali (1018:98)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Setelah di lakukan analisis, hasilnya akan di uji dalam pengujian hipotesis yang dirancang untuk menentukan dugaan sementara hasil penelitian. Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rancangan hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis *alternative* (H_a) menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut:

a. Ujit (Parsial)

Ujit statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa dan Transparansi Anggaran terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat. Pengujian ini dilakukan dengan Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak.

b. Uji F (Simultan)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variable bebasnya secara Bersama-sama terhadap variable terikatnya.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak.

c. Menentukan Taraf Signifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis Tingkat signifikannya adalah 0,05% (- 0,05) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari Kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variable tersebut.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-37307.574	6101.099		-6.115	.000
Var_x1	1.167	.085	.826	13.738	.000
Var_x2	.580	.124	.281	4.680	.000

a. Dependent Variable: Var_Y

Sumber: pengelolaan data dengan SPSS Versi 27

**Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa dan
Transparansi Anggaran Terhadap Tingkat
Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan
Bojongsoang Kabupaten Bandung| Muhammad
Iqbal dan Ahmad Riyadi**

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS di atas maka di dapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = -37307,574 + 1,167 X_1 + 0,580 X_2$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan Desa

X₁ = Transparansi Anggaran

X₂ = Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta dengan nilai -37307,574 hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X₁ dan X₂ = 0), maka Tingkat Kepercayaan Masyarakat adalah sebesar -37307,574.
- 2) Koefisien regresi Akuntabilitas Keuangan Desa (X₁) sebesar 1,167 Koefisien regresi (b1) tersebut hasilnya positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Akuntabilitas Keuangan Desa (X₁) naik 1% (0,01) maka akan diikuti oleh kenaikan Tingkat Kepercayaan Masyarakat sebesar 1,167 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Koefisien regresi Transparansi Anggaran (X₂) sebesar 0,580 Koefisien regresi (b2) tersebut hasilnya positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Transparansi Anggaran (X₂) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Tingkat Kepercayaan Masyarakat sebesar 0,580 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.1.2 Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 5
Hasil Analisis Koerelasi *Pearson Product Moment*
Correlations

		Var_x1	Var_x2	Var_Y
Var_x1	Pearson Correlation	1	.074	.847**
	Sig. (2-tailed)		.573	.000
	N	60	60	60
Var_x2	Pearson Correlation	.074	1	.343**
	Sig. (2-tailed)	.573		.007
	N	60	60	60
Var_Y	Pearson Correlation	.847**	.343**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	
	N	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 27

Tabel 6
Hasil Analisis Korelasi Ganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 ^a	.795	.788	6887.876924

a. Predictors: (Constant), Var_x2, Var_x1

b. Dependent Variable: Var_Y

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 27

- a. Korelasi antara Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Tingkat kepercayaan Masyarakat Adalah sebesar 0,847. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60 0,799 artinya mempunyai hubungan kuat. Karena hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Keuangan Desa akan di ikuti oleh kenaikan Tingkat Kepercayaan Masyarakat.
- b. Korelasi antara Transparansi Anggaran dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat adalah sebesar 0,343. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,20 0,399 artinya mempunyai hubungan yang rendah, karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Transparansi Anggaran akan di ikuti oleh kenaikan Tingkat Kepercayaan Masyarakat.
- c. Korelasi ganda antara Akuntabilitas Keuangan Desa dan Transparansi Anggaran secara simultan dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat adalah sebesar 0,892. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Keuangan Desa dan Transparansi Anggaran secara Bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Tingkat Kepercayaan Masyarakat.

4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel bahwa diketahui *R-square* sebesar 0,795. Nilai *R-square* menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai $KD = 0,795$ (79,5%). Artinya, Penerapan Akuntabilitas Keuangan Desa dan Transparansi Anggaran terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat 79,5%.

4.1.4 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

1. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan Pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima..
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

- a. Pada table 4 serta hasil perhitungan di atas, nilai t_{hitung} untuk variable bebas Akuntabilitas Keuangan Desa (X_1) dapat dilihat pada *t-Statistic* X_1 adalah sebesar 13,78 dengan Tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan t_{tabel} dengan $df = n - k$ atau $60 - 3 = 57$ adalah 2,002 dan taraf signifikansi 0,05, mengacu pada kriteria pengambilan Keputusan dari hasil perhitungan diatas terlihat jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,78 > 2,002$) dan taraf signifikan X_1 sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Pada table 4 serta hasil perhitungan di atas, nilai t_{hitung} untuk variable bebas Transparansi Anggaran (X_2) dapat dilihat pada *t-Statistic* X_2 adalah sebesar 4,680 dengan Tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan t_{tabel} dengan $df = n - k$ atau $60 - 3 = 57$ adalah 2,002 dan taraf signifikansi 0,05, mengacu pada kriteria pengambilan Keputusan dari hasil perhitungan diatas terlihat jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,680 > 2,002$) dan taraf signifikan X_2 sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 7
Hasil Perhitungan Uji-F
Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10504568711.229	2	5252284355.614	110.708	.000 ^b
	Residual	2704242365.754	57	47442848.522		
	Total	13208811076.983	59			

a. Dependent Variable: Var_Y

b. Predictors: (Constant), Var_x2, Var_x1

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 27

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan Pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima..
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Pada table 7 serta dari hasil perhitungan, maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 110,9762 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan table F derajat bebas yaitu residual 57 dan regresi 3 dengan taraf signifikan 0,05 sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,16 (lihat F_{tabel} pada lampiran), karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ (110,9762 $>$ 3,16) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil dari penelitian yang telah diperoleh, maka pembahasan dalam bagian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongsoang.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, diketahui bahwa Akuntabilitas Keuangan Desa memiliki hubungan yang positif terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan Masyarakat. Misalnya, Prasetyo (2020) menjelaskan bahwa desa yang mampu Menyusun laporan keuangan secara akuntabel cenderung memperoleh tanggapan positif dari warganya. Sari (2022) juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan berkontribusi signifikan dalam membentuk kepercayaan public terhadap pemerintah desa. Hal serupa dikemukakan oleh Yuliani dan Prasetyo (2021), yang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara Bersama-sama maupun terpisah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kepercayaan Masyarakat.

Namun demikian, tidak semua temuan penelitian terdahulu mendukung hasil ini. Penelitian oleh Susliyanti dan Binawati (2020), misalnya, menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan Masyarakat. Ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya keterlibatan Masyarakat dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan desa, atau kurangnya akses terhadap informasi laporan keuangan yang tersedia.

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk membangun kepercayaan Masyarakat, diperlukan penerapan akuntabilitas keuangan desa secara konsisten dan terbuka.

Akuntabilitas yang diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akurat akan menciptakan persepsi positif dari Masyarakat. Dengan demikian, Masyarakat akan lebih yakin bahwa dana yang dikelola pemerintah desa digunakan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan harapan publik, sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan terhadap Lembaga pemerintahan desa.

2. Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongsoang.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, dapat disimpulkan bahwa Transparansi Anggaran memiliki hubungan positif terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Bojongsoang. Artinya, setiap peningkatan dalam keterbukaan dan kejelasan informasi anggaran desa akan diikuti oleh peningkatan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah desa. Di sisi lain, penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa transparansi anggaran berdampak signifikan terhadap Tingkat kepercayaan Masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ramdani (2023), yang menemukan bahwa keterbukaan anggaran desa mampu mendorong partisipasi dan membangun kepercayaan publik.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks lapangan, Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap informasi anggaran masih tergolong rendah. Sebagian warga di Kecamatan Bojongsoang, sebagaimana diamati dalam penelitian ini, menyatakan bahwa meskipun informasi keuangan telah diumumkan melalui papan informasi desa, isi dokumen anggaran belum sepenuhnya dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi secara formal belum sepenuhnya efektif, apabila tidak diiringi dengan strategi komunikasi dan edukasi publik yang memadai.

Temuan ini selaras dengan prinsip yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Mengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah bagian dari prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara luas terkait kebijakan keuangan, proses perencanaan, dan pelaksanaannya. Prinsip ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga bentuk partisipasi Masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah desa.

Selain itu, hasil ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safirah Andayani, Ilham Zitri, dan Darmansyah (2024) di Kelurahan Punia, Kota Mataram, yang menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepercayaan Masyarakat, baik secara parsial maupun simultan.

Namun demikian, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi di beberapa desa. Beberapa hambatan yang diidentifikasi di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), rendahnya kompetensi di bidang administrasi anggaran, dan belum optimalnya penyampaian informasi secara langsung kepada Masyarakat melalui media yang mudah diakses. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan sistem informasi publik sangat dibutuhkan untuk mendorong transparansi anggaran yang lebih efektif dan dapat dipercaya oleh Masyarakat.

3. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan desa dan Transparansi Anggaran terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongsoang.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan Desa dan Transparansi Anggaran secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Bojongsoang. Artinya, semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkat secara signifikan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pada tingkat kepercayaan masyarakat dijelaskan oleh kombinasi dari akuntabilitas dan transparansi anggaran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat,

yang memperkuat bahwa kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini memperkuat pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, pemerintah desa di seluruh wilayah Kecamatan Bojongsoang perlu meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi anggaran sebagai strategi untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hafiez Sofyani dan Afrizal Tahar (2021) di Kabupaten Bantul, yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung temuan-temuan sebelumnya bahwa transparansi anggaran merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Megi Prihatin dan Fariz Mustaqim (2024) di Kabupaten Buton Utara. Dengan kata lain, kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila mereka merasakan adanya kejelasan, keterbukaan, dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa.

Peneliti dapat memahami bahwa Akuntabilitas Keuangan Desa dan Transparansi Anggaran yang dikelola dengan baik akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Semakin akuntabel dan transparan pengelolaan dana desa, maka akan semakin besar pula legitimasi dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah desa.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan Desa dapat digambarkan berada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa sudah berjalan baik memadai, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar lebih maksimal dan keberlanjutan pada Pemerintahan Desa Kecamatan Bojongsoang.
2. Transparansi Anggaran dapat digambarkan berada katagori baik, Hal ini menunjukkan bahwa informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sudah cukup terbuka kepada masyarakat. Meskipun demikian, agar lebih optimal, pemerintah desa tetap perlu meningkatkan keterbukaan ini melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan mudah diakses masyarakat.
3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat dapat digambarkan cukup baik, Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa masih berada pada kategori cukup baik. Ini berarti bahwa meskipun akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan, hal tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut, khususnya dalam hal sosialisasi, pelibatan aktif masyarakat, dan komunikasi publik, agar masyarakat lebih memahami serta merasakan manfaat dari keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

1.3 Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Akuntabilitas Keuangan Desa sudah optimal, baik namun masih terkendala rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa di seluruh Kecamatan Bojongsoang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, terutama pada pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun laporan keuangan secara tepat, jelas, dan transparan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa masing-masing.

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa transparansi anggaran sudah optimal walaupun secara keseluruhan memiliki kriteria baik. Untuk menumbuhkan transparansi anggaran agar lebih baik, hal ini apaatur desa untuk mendorong transparansi Anggaran secara Aktif dan Terbuka Seluruh desa perlu menyampaikan informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Media sosialisasi bisa melalui papan informasi desa, tentang prosedur, biaya, dan waktu layanan harus mudah di akses media sosial resmi desa, karna masih banyak yang belum bisa di akses, ataupun forum musyawarah warga. Transparansi ini akan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap aparaturn pemerintah desa.
3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Akuntabilitas Keuangan Desa dapat meningkatkan transparansi dengan memastikan keterbukaan informasi melalui berbagai media, seperti pemasangan ringkasan APBDes dan laporan realisasi di papan informasi desa, penyebaran informasi melalui website atau media sosial resmi, serta menyediakan layanan informasi publik yang memudahkan warga mengakses dokumen. Laporan APBDes sebaiknya disajikan dalam format sederhana dan mudah dipahami, misalnya dengan infografis atau tabel ringkas, dan dibagikan melalui grup WhatsApp RT/RW maupun pojok informasi di kantor desa. Pelibatan warga dalam perencanaan anggaran dapat dilakukan melalui musyawarah desa terbuka yang mengundang berbagai unsur masyarakat, pemberian kotak saran atau survei untuk menjangir aspirasi, serta pengumuman jadwal musyawarah secara terbuka agar warga memiliki waktu untuk mempersiapkan usulan. Selain itu, desa dapat membentuk tim pemantau yang melibatkan perwakilan warga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, kemudian menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA :

- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 25.
(diakses pada 8 mei 2025, iam 20.30)
- Kurniawan, A. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Bandung. Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan, 8(2), 45-60.
- Yuliani, R. (2020). Literasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Lentera Pembangunan Desa. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa, 8(1), 45-58.
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Tentang Pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- Setiawan, R. (2022). Dinamika Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Anggaran: Studi di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 75-90.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2018.
- Permendagri no. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2-39.
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Tentang Pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. (Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>)

**Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa dan
Transparansi Anggaran Terhadap Tingkat
Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan
Bojongsoang Kabupaten Bandung| Muhammad
Iqbal dan Ahmad Riyadi**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Tahun 2023, hlm. 78. <https://www.bpk.go.id/>

Transparansi Dana Desa: Wujudkan Desa yang Akuntabel dan Maju,” Website Resmi Desa Tayem, diakses pada 5 Maret 2025, <https://www.tayem.desa.id/transparansi-dana-desa-wujudkan-desa-yang-akuntabel-dan-maju>;

Websit kantor Kecamatan Bojongsoang kabupaten Bandung jawa barat <https://kecamatanbojongsoang.bandungkab.go.id/public/>